P-ISSN: 2615-3416
E-ISSN: 2615-7845

Jurnal Hukum

SAMUDRA KEADILAN

Editorial Office : Jl. Prof. Syarif Thayer, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com
Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

PERANAN HAKIM DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SEBAGAI PENGUBAH DAN PEMBAHARU HUKUM PIDANA

Hasanal Mulkan

*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Jl. Jenderal Ahmad Yani, 13 Ulu, Kec. Plaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30116
hasanal_mulkan@yahoo.co.id*

Abstract

*The role of judges in criminal law enforcement, that the judge as the party deciding the case plays a very important role in determining the future of the law, because every judge's decision will be the center of public attention, therefore the judge does not only play a role as a mouthpiece of law, but the judge also acts as a legal inventor (*recht vinding*), in accordance with the cultural values that live in society, especially the values of Pancasila. The role of judges in deciding criminal cases which can fulfill the sense of justice of the community, in terms of deciding a case the judge has freedom, this is in accordance with one of the elements of the rule of law which states that there is a free and impartial trial, therefore the judge in addition to paying attention to the provisions that written in law also uses conscience, namely based on the conviction of the judge and the sense of justice of the community, this is in line with the notion of a progressive type of law enforcement.*

Keywords: Judge, Criminal Case, Justice.

Abstrak

Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana, bahwa hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat, oleh karenanya hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*recht vinding*), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat terutama nilai-nilai Pancasila. Peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas

dan tidak memihak, oleh karenanya hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang juga menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum progresif.

Kata kunci: Hakim, Perkara Pidana, Keadilan.

PENDAHULUAN

Hakim diuntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks Undang-Undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal. Dimana Hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di pengadilan (*within the exercise of the judicial function*).¹ Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks Undang-Undang kedalam peristiwa yang kongkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang kongkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya. Hampir tidak ada ahli hukum yang tidak menyepakati bahwa hukum (selalu) memerlukan pembaruan. Hal ini terjadi karena masyarakat selalu berubah, tidak statis. Menurut Satjipto Rahardjo menyebutkan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat digolongkan kedalam dua kategori

1. Perubahan yang lambat, yang inkremental, bertambah sedikit demi sedikit
2. Perubahan dalam skala besar, perubahan revolusioner.

Terhadap perubahan yang lambat adaptasi antara hukum dan masyarakat cukup dilakukan dengan melakukan perubahan kecil-kecilan pada tatanan peraturan yang ada, baik dengan cara mengubah maupun menambahnya. Metode penafsiran hukum dan konstruksi hukum juga termasuk pada perlengkapan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang tidak berskala besar.

Lain lagi persoalannya bila perubahan itu bersifat atau berskala besar. Pembaruan dengan cara kecil-kecilan seperti di atas tidak mungkin lagi cukup untuk mengatasinya. Penyesuaian harus dilakukan secara revolusioner sebagaimana ditempuh oleh negara-negara Eropa ketika mereka memilih peradaban *civil society* (masyarakat sipil).

Soetandyo Wignjosoebroto dalam artikel berjudul Pembaruan Hukum Masyarakat Indonesia Baru membedakan pembaruan hukum dalam artilegal reform dengan pembaruan hukum dalam artilegal reform. Pembaruan hukum dalam artilegal reform diperuntukkan bagi masyarakat dimana hukum hanya sebagai subsistem dan berfungsi sebagai *tool of social engineering* semata-mata. Hukum hanya menjadi bagian dari proses politik yang mungkin juga progresif dan reformatif. Pembaruan hukum di sini kemudian hanya berarti sebagai pembaruan undang-undang. Sebagai proses politik Soetandyo gamblang menyatakan pembaruan hukum hanya melibatkan pemikiran-pemikiran kaum politisi atau juga sedikit kaum elit profesional yang memiliki akses lobi. Indonesia menurut Soetandyo termasuk dalam kategori ini.

¹Abdul Ghafur Anshori, "Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaannya", (yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), hlm. 33.

Hal ini beda dengan pembaruan hukum dalam *artilaw reform* dalam bentuk ini hukum bukanlah urusan para hakim dan penegak hukum lainnya, tetapi juga urusan publik secara umum. Mungkin saja telah dibuat dalam bentuk undang-undang, tetapi undang-undang itu tidak bersifat sakral di atas segalanya. Dalam konsep ini hukum adalah produk aktivitas politik rakyat yang berdaulat, yang digerakkan oleh kepentingan rakyat yang berdaulat yang mungkin saja diilhami oleh kebutuhan ekonomi, norma sosial, atau nilai-nilai ideal kultur rakyat itu sendiri.

Pengertian Soetandyo Wignjosoebroto tentang *law reform* ini tidaklah aneh bila dikaitkan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal ini memberi amanat kepada hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Frasa menggali, mengikuti, dan memahami memberi arti bahwa nilai-nilai hukum dimaksud belum tampak di permukaan, tegasnya tidak dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

Abdul Manan menerangkan ada dua pandangan dominan berkaitan dengan perubahan (tentu dalam arti pembaruan) hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara, yaitu pandangan tradisional dan pandangan modern. Dalam pandangan tradisional, masyarakat harus berubah dahulu baru hukum datang mengaturnya. Sebaliknya dalam pandangan modern, agar hukum dapat menampung segala perkembangan baru, hukum harus selalu berada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi. Abdul Manan juga menjelaskan bahwa dalam bidang hukum yang netral perubahan harus ditujukan untuk melahirkan suatu kepastian hukum, sebaliknya dalam bidang kehidupan pribadi hukum harus berfungsi sebagai sarana sosial kontrol dalam kehidupan masyarakat.

Membagi bidang hukum menjadi bidang hukum netral dan non-netral ini juga ditempuh oleh Mochtar Kusumaatmadja. Bidang hukum netral seperti hukum dalam bidang perekonomian untuk kepastian hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja dapat dilakukan pembaruan dalam bentuk unifikasi, tetapi dalam bidang hukum non-netral seperti bidang hukum keluarga pembaruan dalam bentuk unifikasi tidaklah mudah karena menyangkut kultur dan keyakinan masyarakat, apalagi dalam masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia ini. Akan tetapi dalam hal ini bangsa Indonesia punya pengalaman unik karena telah berhasil melakukan unifikasi bidang hukum non-netral tadi, yaitu dengan lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karena itulah Hazairin atau Lili Rasjidi menyebut undang-undang ini sebagai unifikasi yang unik, karena masih mentolerir adanya pluralisme hukum. Uraian di atas sekedar untuk menggambarkan bahwa pembaruan hukum dalam pandangan para ahli adalah suatu keharusan. Perbedaan di antara mereka biasanya berkisar pada metode dan prioritas saja.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan mengenai negara hukum dapat dijumpai dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah Amandemen (selanjutnya disebut UUD Amandemen). Berbeda dengan UUD 1945 sebelum Amandemen (selanjutnya disebut UUD 1945), bahwa mengenai Negara hukum tidak secara eksplisit dicantumkan dalam batang tubuh. Jika dicermati dalam UUD 1945, bahwa kalimat mengenai “hukum” dapat dibaca dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 merupakan ketentuan yang mengatur kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, bukan mengatur mengenai Negara hukum. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Negara hukum dalam UUD 1945 tidak diatur dalam batang tubuh, melainkan diatur dalam Penjelasan UUD 1945.² Sangat ironis jika ketentuan yang sangat fundamen mengenai Negara hukum hanya dibuat dalam Penjelasan

²Asri Umar, “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025”, (Jakarta: Citra Utama, 2007), hlm. 6

UUD 1945. Padahal apabila dilihat dalam sejarah perumusan UUD 1945, bahwa BPUPKI tidak pernah memberikan penjelasan dalam UUD 1945. Oleh karena itu keberadaan penjelasan dalam UUD 1945 diragukan keotentikannya. Sehingga tidaklah salah apabila pada masa pemerintahan orde baru kekuasaan menjadi panglima, sedangkan hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan untuk melegitimasi perbuatan penguasa pada waktu itu. Setelah UUD Amandemen ketentuan mengenai Negara hukum di masukkan dalam batang tubuh, ini artinya bahwa pada orde reformasi hukum menjadi panglimanya dan menduduki prioritas utama.³

Berbicara mengenai hukum, maka tidak lepas dari paham rule of law yang mempersyaratkan adanya tiga prinsip dasar, yaitu:

1. *supremacy of law*, yaitu segala tindakan negara dan warga negara harus dilakukan berdasar atas hukum atau tidak bertentangan dengan hukum;
2. *equality before the law*, yaitu setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan karenanya harus diperlakukan sama;
3. *due process of law*, yaitu proses penegakan hukum harus diabadikan bukan semata demi tegaknya hukum, melainkan demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu proses penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang justru bertentangan dengan hukum melainkan harus dengan mengindahkan harkat dan martabat manusia beserta hak-hak yang melekat padanya;

Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya. Bentuk-bentuk aturan normatif seperti itu tumbuh sendiri dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara ataupun sengaja dibuat menurut prosedur-prosedur yang ditentukan dalam sistem organisasi kekuasaan dalam masyarakat yang bersangkutan. Makin maju dan kompleks kehidupan suatu masyarakat, makin berkembang pula tuntutan keteraturan dalam pola-pola perilaku dalam kehidupan masyarakat itu. Kebutuhan akan keteraturan ini kemudian melahirkan sistem keorganisasian yang makin berkembang menjadi semacam organization imperative. Makin maju suatu masyarakat, maka makin berkembang pula kecenderungan masyarakat untuk mengikatkan diri dalam sistem keorganisasian yang teratur. Dalam sistem pengorganisasian yang teratur itu pada gilirannya akan tercipta mekanisme yang tersendiri berkenaan dengan proses pembuatan hukum, penerapan hukum, dan peradilan terhadap penyimpangan-penyimpangan hukum dalam masyarakat yang makin terorganisasi itu.⁴

Kebebasan hakim dapat di uji ke dalam dua hal, yaitu: ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (*political insularity*). Oyang tidak ada relasi kepentingan dengan perkara, sedangkan prinsip keterputusan dengan aktor politik akan tercermin dari daya laku putusan yang adil dan diterima masyarakat pencari keadilan. Penilaian hukum sebagai proses pemaknaan akal budi dan hati nurani manusia terhadap teks undang-undang terhadap peristiwa kongkrit yang dijalankan hakim, melibatkan perspektif pemikiran dan hati nurani yang bersifat individual. Kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum merupakan kegiatan yang bersifat individual. Kebebasan hakim sebagai ekspresi intelektual dan moral yang bersumber dari individu hakim memerlukan persyaratan kompetensi dan integritas tinggi dalam rangka menggali makna-makna tersembunyi di balik teks undang-undang. Terdapat beberapa persyaratan untuk menjamin kompetensi

³Mochtar Kusumaatmadja, “Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan”, (Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan & Alumni, 2002), hlm. 22.

⁴Erdianto Efendi, “Hukum Pidana Indonesia”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 20.

dan integritas hakim agar tetap dipercaya masyarakat; Pertama, sejauhmana hakim bisa bekerja dengan objektif, apakah hakim yang di konstruksikan sebagai manusia bebas (kebebasan hakim) tidak bias atau berat sebelah, dan apakah senantiasa berpihak pada kebenaran. Kedua, apakah benar hakim yang baik, secara sadar atau tidak sadar tidak akan di pengaruhi sikap prejudice, disebabkan latar belakang sosial politiknya ketika memutus perkara, padahal seharusnya bersikap objektif dan imparisial. Ketiga apakah sikap bias di pengaruhi cara hakim dalam memahami kedudukan dan fungsinya, karena setiap mengadili perkara akan terjadi pro dan kontra.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. 1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pembaharuan hukum pidana?
2. Bagaimana peranan Hakim dalam persidangan perkara pidana sebagai pengubah dan pembaharu hukum?

METODOLOGI PENELITIAN

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif, hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in a book*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian normatif yakni penelitian hukum yang dilaksanakan menggunakan teknik meneliti bahan pustaka yang memakai objek penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berbentuk buku-buku, majalah, serta ketetapan-ketetapan yang memiliki hubungan dengan pembahasan ini mengenai peranan hakim dalam persidangan perkara pidana sebagai pengubah dan pembaharu hukum, alhasil penulisan ini sifatnya juga penulisan pustaka (*library research*).⁶

PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembaharuan Hukum Pidana

Untuk menemukan pengertian yang tepat mengenai makna “mengadili menurut hukum” sangat perlu dipahami perkembangan beberapa konsep yang mendasarinya. Pengertian “hukum”, perkataan hukum dalam asas “memutus menurut hukum” diartikan sangat luas, yaitu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, termasuk juga hukum yang terlahir dari suatu perjanjian (sebagai undang-undang bagi pihak). Bahkan lebih luas lagi yaitu keharusan memperhatikan kepatutan (Pasal 1339 BW), kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 BW).⁷ Asas mengadili menurut hukum adalah perwujudan asas legalitas sebagai salah satu unsur pokok paham Negara berdasarkan asas hukum. Asas legalitas mengandung makna, bahwa setiap putusan hakim atau keputusan penyelenggara Negara diluar hakim atau penyelenggara pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang sudah ada sebelum putusan atau keputusan itu di lakukan. Pengertian hukum yang sudah ada meliputi hukum materiil (substantive) maupun hukum formal (procedural). Keharusan ada hukum sebagai dasar memutus dimaksudkan untuk mencegah hakim atau pejabat pemutus lainnya berlaku sewenang-

⁵ Peter Mahmud Marzuki. “*Penelitian Hukum*”. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009). hlm.93

⁶ Soerjono Soekanto. “*Penelitian Hukum Normatif*”. (Jakarta: Rajawali Press. 1998). hlm.15.

⁷Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Menyoal Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, PUSAKO Universitas Andalas, Volume II, Nomor 2, November. Hlm. 57

wenang, yaitu memutus menurut kehendak sendiri yang ada pada dirinya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata 'pembaruan' sebagai proses, cara, perbuatan membarui. Membarui itu sendiri menurut KBBI bermakna (1) memperbaiki supaya menjadi baru, (2) mengulangi sekali lagi, memulai lagi dan (3) mengganti dengan yang baru, memodernkan. Bila dikaitkan dengan kata 'hukum' maka akan muncul frasa yang berbunyi : proses pelaksanaan pembaruan hukum melalui cara memperbaiki, memodernkan, atau mengganti dengan yang baru.⁸

Dalam bahasa Arab pembaruan adalah terjemahan dari kata *tajdīd*. Abdul Manan, Guru Besar dan Hakim Agung dalam bukunya 'Aspek Pengubah Hukum' menjelaskan panjang lebar tentang pengertian *tajdīd* ini berdasarkan sumber-sumber yang akurat. Arti terminologi *tajdīd* berdasarkan pandangan Muhammadiyah diuraikan pula secara panjang lebar oleh Rifyal Ka'bah, Guru Besar dan Hakim Agung dalam bukunya 'Hukum Islam di Indonesia'.⁹ Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Muhammadiyah, Rifyal Ka'bah menyimpulkan bahwa pembaruan hukum menurut Muhammadiyah adalah gabungan dari *tajdīd* dan *ijtihad*.

Ada juga yang menggunakan istilah lain untuk pembaruan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo ada yang menggunakan istilah-istilah pembangunan hukum, perubahan hukum, pembinaan hukum, atau modernisasi hukum. Terakhir banyak pula yang menggunakan istilah reformasi hukum yang merupakan terjemahan dari legal reform. Walau bermacam-macam istilah yang digunakan, Satjipto sepakat dengan Sudargo Gautama untuk menggunakan istilah pembaruan hukum, karena istilah ini lebih dekat untuk menggambarkan bagaimana menyusun suatu tata hukum yang dapat menyesuaikan diri pada perubahan yang terjadi pada masyarakat.

Menurut RPJP Nasional 2005-2025 pembangunan hukum dilaksanakan melalui : 'Pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global'.

Pada bagian lain pernyataan seperti ini muncul lagi dengan perubahan sedikit kata (ditandai dengan cetak tebal) seperti dibawah ini : 'Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur, sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar'.

Kutipan-kutipan di atas ini menggambarkan RPJP Nasional 2005-2025 menghendaki adanya pembaruan hukum, terutama dalam bentuk pembaruan materi hukum, yang maksudnya tidak lain ialah pembaruan peraturan perundang-undangan. Hal ini dibuktikan dengan sering munculnya undang-undang baru yang merevisi undang-undang sebelumnya. Walaupun demikian, meminjam istilah Soetandyo Wignjosoebroto pembaruan hukum yang dipandu oleh RPJP Nasional 2005-2025

⁸"Kamus Besar Bahasa Indonesia", Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal.45.

⁹Eugen Ehrlich, "Fundamental Principles of The Sociology of Law", (New York: Russel & Russel Inc., 1962), hlm. 11.

masih termasuk kategori legal reform Satu-satunya harapan terjadinya pembaruan hukum dalam arti law reform ada ditangan para hakim, karena berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 hakim diberi kewenangan mutlak untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat¹⁰

Penegakan hukum pidana pada kenyataannya tidak dapat memperbaiki, namun dengan sanksi pidana sebagai salah satu tujuannya diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.¹¹ Penjatuhan sanksi pidana bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari pelanggaran atas perbuatan yang dilarang, perbuatan yang diharuskan atau kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum yang diatur dalam undang-undang. Peranan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum semakin penting. Bahkan dalam kasus-kasus pidana yang berat, sifatnya sebagai "*primum remedium*" semakin nampak. Sekalipun demikian, efektivitasnya akan banyak tergantung pada kualitas mental dan intelektual para penegak hukumnya, terutama untuk memahami spirit dan substansi hukum pidana yang cukup kompleks.¹²

2. Peranan Hakim dalam Persidangan Perkara Pidana sebagai Pengubah dan Pembaharu Hukum

Tidak dapat disangkal bahwa di lingkungan Peradilan sudah banyak terjadipembaruan hukum. Pembaruan hukum di lingkungan Peradilan juga mencakupbidang hukum formil dan hukum materil. Dalam hukum formil, diskursus tentangkesetaraan laki-laki dengan perempuan untuk menjadi hakim, peranan hakimperempuan dalam majelis, kebolehan perempuan menjadi ketua pengadilan,peranan dan jumlah perempuan sebagai saksi dalam persidangan telah menjadisejarah masa lalu.Pembaruan dalam hukum formil juga terdapat dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan yang biasa disebut dengan Buku II. Sebagaicontoh dapat disebut di sini ialah kewajiban bagi para pemohon izin poligami untukmengajukan penetapan harta bersama dengan isteri atau isteri-isteri sebelumnya. Apabila permohonan penetapan harta bersama ini tidak dilakukan oleh pihak suami,maka isteri dapat mengajukan dalam bentuk rekonsensi.Pembaruan dalam bidang hukum materil secara umum dapat di lihat dalam UUNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan lebih signifikan dalam KompilasiHukum Islam. Akan tetapi saat ini dalam bidang hukum keluarga, para hakimPeradilan Agama umumnya memperhatikan juga undang-undang yang berkaitandengan HAM dan perlindungan anak. Dalam bidang kewarisan, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan beberapa yurisprudensi tentang ahli waris beda agama

Telah diuraikan diatas, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman, peranan dan peluang pembaruan hukum terbesar berada di tangan hakim. Terkait dengan hakim di Peradilan Agama, tugas menggali,mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat menjadi tidak sederhana tetapi sangat menarik. Setidaknya ada dua hal yang mengindikasikan hal ini :

Pertama karena terbesar materi hukum yang menjadi kewenangan Peradilan Agama adalah Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqih, makasetiap langkah pembaruan akan terkendala oleh justifikasi Wahbah Zuhaili diatas,karena dari lima metode yang ada, hanya satu yang dibenarkan. Melihat das sein yang terjadi dalam masyarakat Islam diluar negara-negara Timur Tengah,

¹⁰ Adami Chazaw, "*Pelajaran Hukum Pidana*", (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 168

¹¹Satjipto Rahadjo, 1989. *Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol Sosial*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Vol. I/Nomor I. Hlm. 97

¹²Michael Brama, 2016. *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume III/No. 8. Hlm. 8.

bila hanya melalui metode *mutadil mutawazin* atau metode moderat, maka pembaruan hukum menjadi hampir mustahil sama sekali.

Kedua, masih ada aliran pemikiran di kalangan hakim Peradilan Agama yang memang tidak disiapkan untuk pembaruan hukum yang memang benar-benar dibutuhkan dalam hukum keluarga. Kaidah-kaidah konkrit hukum keluarga sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh dianggap telah final karena bertolak dari paradigma Ushul Fiqih yang telah disakralkan, sehingga pendekatan epistemologis menjadi sesuatu yang haram. Ada sebuah ironi yang memprihatinkan, sementara orang-orang Islam mengecam hukum sekuler yang memisahkan hukum dengan moral, ternyata mereka melupakan bahwa penyusunan fiqh juga hanya mempedomani ayat-ayat muhkamat, dan tidak sedikit yang not care terhadap moral yang banyak terdapat dalam ayat-ayat mutasyabihat.

Belajar dari kekalahan partai-partai Islam dalam setiap pemilihan umum di tanah air sementara mayoritas pemilih adalah orang-orang Islam, para hakim Peradilan Agama harus mendalami tema-tema pokok Hukum Islam dengan memperhatikan tema-tema pokok Al-Quran, dan itu tidak lepas dari sosio-historis turunnya Al-Quran. Orang-orang Islam Indonesia, meminjam istilah Savigny, mempunyai *volksgeist* atau spirit of the people sendiri yang berbeda dengan orang-orang Islam di penjuru dunia yang lain. Tema-tema pokok Al-Quranlah yang akan menjustifikasi apakah *volksgeist* itu Islami atau tidak.

Dalam bidang hukum keluarga, penerapan tema-tema pokok Al-Quran seperti penghormatan terhadap martabat kemanusiaan (QS. 17 : 70), persamaan derajat (QS. 49 : 13) penghapusan diskriminasi (QS. 41 : 44), kesetaraan pria-wanita (QS. 4: 7 ; 16 : 97 ; 40 : 40) , pengutamaan keselamatan dan kesejahteraan anak (QS. 4 : 9), penegakkan prinsip-prinsip moral (QS. 68 : 4) dan lain sebagainya akan merupakan faktor yang membuat putusan Pengadilan Agama dinilai sebagai putusan yang memiliki kekuatan *whenever it is true* (kebenaran yang berlaku kapanpun), karena putusan ini telah memenuhi persyaratan yang disarankan Eugen Ehrlich (1962 : 457). Persyaratan tersebut berbunyi : *In order to be true, it must be based on the inner nature of things, and must be in accord with the volksgeist*

I. Institusi Pembuat Hukum

Menurut teori Montesquie, bahwa kekuasaan Negara dibagi dalam menjadi 3, yaitu:

1. legislatif (DPR);
2. eksekutif (Pemerintah).
3. yudikatif (Pengadilan);

Pada dasarnya ketiga institusi tersebut terlibat dalam proses pembentukan atau pembuatan hukum. Dibawah ini akan diuraikan dasar hukum yang memberikan kewenangan institusi tersebut;

a. DPR

DPR merupakan lembaga legislatif yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kewenangan DPR demikian diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD Amandemen yang berbunyi, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Kewenangan DPR tersebut berbeda dengan kewenangan DPR sebelum Amendemen UUD 1945. Jika dilihat dalam UUD 1945, DPR tidak diberikan kewenangan membentuk undang-undang, melainkan hanya diberikan kewenangan memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah. Ini artinya bahwa inisiatif pembentukan undang-undang adalah ditangan Pemerintah.

Namun setelah UUD Amandemen, DPR diberikan kewenangan legislasi (membentuk undang-undang). Dengan diberikan kewenangan legislasi pada DPR, maka UUD Amandemen telah mendudukan DPR sebagaimana lembaga legislatif pada umumnya.¹³

b. Pemerintah

Dalam UUD 1945, Presiden diberikan kewenangan antara lain membentuk undang-undang, membuat peraturan pemerintah. Namun setelah amandemen UUD 1945, Presiden menurut Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UUD Amandemen diberikan kewenangan untuk membuat rancangan undang-undang dan membuat peraturan pemerintah. Pemerintah sebelum amandemen UUD 1945 merupakan produsen hukum terbesar di sepanjang sejarah. Kenyataan ini mengakibatkan peran pemerintah menjadi sentral, dan ini bisa juga menimbulkan eksese, yaitu organisasi pemerintah menjadi sangat berkuasa di atas fungsi-fungsi organisasi di luar pemerintahan.

Untuk menghindari pemusatan kekuasaan di tangan organisasi pemerintah, muncul ide untuk mengadakan pemisahan kekuasaan (*separation of power*, misalnya dari Montesquieu) dan pembagian kekuasaan (*division of power*). Munculnya ide-ide konstitusionalisme, gagasan negara hukum (*Rechtsstaat dan the Rule of Law*) pada dasarnya berusaha membatasi kekuasaan pemerintah supaya tidak terlalu dominan. Oleh karena itu setelah amandemen UUD 1945 Pemerintah tidak lagi diberikan kewenangan membentuk undang-undang, melainkan diberikan kewenangan untuk membuat rancangan undang-undang.

c. Pengadilan

Dalam sistem “*civil law*”, peran pemerintah dan parlemen sangat dominan dalam pembuatan hukum, tetapi dalam sistem “*common law*” (“*judge-made law*”), justru pengadilanlah yang lebih dominan pengaruhnya. Tetapi dewasa ini, ada kecenderungan kuat di lingkungan negara-negara yang menganut sistem *judge-made law* ini untuk memberi peran lebih besar pada Undang-Undang seperti dalam sistem “*civil law*”. Sebaliknya di lingkungan “*civil law*” ada pula keinginan untuk memperbesar peran pengadilan sebagai institusi pembentuk hukum (gejala konvergensi antar sistem hukum). Dalam sistem “*civil law*” seperti di Eropa dan Indonesia, putusan pengadilan juga diakui sebagai sumber hukum, yaitu disebut yurisprudensi. Akan tetapi, peranannya selama ini bersifat sekunder, tidak seperti di lingkungan negara yang menganut sistem “*judge-made law*”. Tetapi, di masa depan, atas pengaruh sistem hukum Anglo-Amerika di dunia Internasional, maka apresiasi terhadap sistem “*judge-made law*” (*common law*) ini meningkat pula di lingkungan negara-negara dengan sistem “*civil law*”. Apalagi, kita mengetahui bahwa peranan Amerika Serikat dalam “*global market economy*” maupun dalam sistem demokrasi global terus meningkat. Lagi pula hampir semua negara tetangga Indonesia, seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Philipina, Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang semuanya mengatur sistem ‘*common law*’. Dengan demikian, sistem hukum yang dianut Indonesia di kawasan Asia Pasifik ini relatif sangat langka, padahal dalam pergaulan ekonomi regional bangsa Indonesia harus berhubungan erat dengan bangsa-bangsa di sekitar kawasan ini. Karena itu, ada kebutuhan bahwa di masa mendatang, peranan hakim dan lembaga pengadilan dalam membentuk hukum Indonesia perlu terus ditingkatkan.

Latar belakang Pengadilan sebagai pembentuk hukum didasarkan pada Pasal 22 AB yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim dilarang untuk menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Hakim dituntut untuk mencari hukum dengan cara menggali hukum tersebut. Ketentuan

¹³Nina M. Armando (et al), “*Ensiklopedia Islam*”, Ihtiar baru Van Hoeve Jakarta, 2005-Rifyal Kabah, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hlm. 45.

Pasal 22 AB tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ini artinya bahwa hakim bukanlah corong undang-undang, melainkan Hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk mohon keadilan. Andai kata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung-jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, Bangsa dan Negara.¹⁴

II. Proses Pembuatan Hukum

Masing-masing institusi tersebut diatas, mempunyai cara tersendiri dalam membentuk hukum. Dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945, proses pembentukan hukum dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pembentukan Hukum Perundang-Undangan

Dalam sistem hukum nasional Indonesia berdasarkan UUD 1945, hukum perundang-undangan meliputi UUD, TAP MPR, UU, PP, Keppres, Keputusan Menteri, Keputusan Dirjen dan seterusnya. UUD, dan TAP MPR ditetapkan oleh MPR, sedangkan UU dibentuk oleh DPR. Perpu ditetapkan oleh Presiden, tetapi dalam satu tahun harus sudah dimintakan persetujuan DPR. Jika disetujui Perpu meningkat statusnya menjadi Undang-undang, dan jika ditolak oleh DPR, maka Perpu itu harus dicabut dan tidak dapat lagi diajukan ke DPR dalam masa persidangan berikutnya. Peraturan Pemerintah ditetapkan sendiri oleh Pemerintah tanpa harus disetujui DPR. Peraturan Pemerintah biasanya dibuat atas perintah undang-undang atau untuk melaksanakan suatu undang-undang. Karena itu, Peraturan Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri tanpa pendelegasian materiil dari undang-undang yang sudah ada lebih dahulu. Keputusan Presiden, dibentuk oleh Presiden tanpa perlu dikaitkan dengan pendelegasian materiil dari Undang-Undang. Artinya, materi yang dimuat dalam Keppres dapat sepenuhnya bersifat mandiri dalam rangka kewenangan Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan. Keputusan Presiden dapat saja dibuat untuk melaksanakan perintah UUD, perintah GBHN, perintah UU, ataupun perintah Peraturan Pemerintah. Di bawah Keppres, ada Keputusan Menteri, dan Keputusan Direktur Jenderal yang semuanya bersifat operasional dalam rangka pelaksanaan tugas Menteri menurut bidang tugasnya masing-masing. Sedangkan Peraturan Daerah Tingkat I, Peraturan Daerah Tingkat II, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati, Keputusan Walikota, dan sebagainya. Ketentuan mengenai pembuatan hukum di tingkat daerah ini, seyogyanya juga mengikuti pola di tingkat pusat. Misalnya, Peraturan Daerah dibuat oleh Gubernur dengan persetujuan DPRD. Tetapi DPRD sendiri dapat pula berinisiatif mengajukan Rancangan Perda seperti hak inisiatif DPR Pusat untuk mengajukan RUU tertentu kepada Pemerintah.

b. Pembentukan Hukum Yurisprudensi

Yurisprudensi terbentuk atas dasar keputusan hakim yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap. Putusan hakim yang demikian dapat dijadikan sandaran bagi hakim berikutnya dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum sejenis di kemudian hari dengan mempertimbangkan fakta-fakta baru, baik karena perbedaan ruang dan waktu maupun karena perbedaan subjek hukum yang terlibat. Asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam kasus-kasus yang diselesaikan dapat diambil menjadi dasar hukum untuk memutuskan perkara yang dihadapi. Para hakim dituntut bertindak aktif dan proaktif dalam menafsirkan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam keputusan-keputusan terdahulu, baik oleh hakim yang bersangkutan ataupun hakim-hakim lain

¹⁴ Rusli Muhammad, *"Potret Lembaga Pengadilan Indonesia"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 15.

di tempat yang berbeda. Untuk di Indonesia, tidak ada keharusan hakim mengikuti putusan telah menjadi yurisprudensi.¹⁵

III. Institusi Pengubah Hukum

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa DPR dan Presiden mempunyai tugas antara lain membuat peraturan perundang-undangan, hanya saja bedanya DPR membuat undang-undang, sedangkan Presiden membuat peraturan di bawah undang-undang. Apabila kedua lembaga tersebut mempunyai kewenangan membentuk undang-undang dan atau peraturan, maka dengan sendirinya ia juga mempunyai kewenangan untuk mengubah atau merevisi dan/atau mencabut undang-undang dan peraturan tersebut. Revisi dan/atau pencabutan undang-undang dan peraturan dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

- a) Undang-undang dan peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi jaman (ketinggalan jaman);
- b) Undang-undang dan peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya;

Untuk mencabut undang-undang dan peraturan yang karena alasan tersebut diatas, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a) Jika undang-undang dan peraturan tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, dapat dicabut sendiri oleh yang membuat undang-undang dan peraturan, baik untuk diadakan revisi atau dibuat undang-undang dan peraturan yang baru.
- b) Jika undang-undang dan peraturan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, dapat dicabut sendiri oleh lembaga yang membuatnya, namun ini jarang terjadi dan biasanya lembaga yang membuat peraturan enggan untuk mencabutnya. (asas: selama peraturan itu tidak ada yang mempersoalkan, maka peraturan dimaksud dianggap sah berlakunya);

Sebelum amandemen UUD 1945 tidak dikenal adanya *judicial review* undang-undang. Kalau ada itu *judicial review* peraturan dibawah undang-undang yang hal tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Setelah amandemen UUD 1945 telah terjadi perubahan kelembagaan di negara Indonesia yang salah satunya adanya lahirnya Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan sebagai sarana checks and balances dan menjaga konstitusionalitas hukum.¹⁶ Di negara-negara yang menganut prinsip supremasi parlemen, yang pada umumnya adalah negara-negara yang sistem hukumnya mengadopsi tradisi civil law, pada mulanya tidak dikenal lembaga *judicial review*. Hal tersebut juga terjadi di Indonesia pada massa orde lama dan orde baru, dimana undang-undang tidak dapat diuji. Dasar pemikiran undang-undang tidak dapat diuji, karena undang-undang adalah produk parlemen, sedangkan parlemen adalah lembaga yang merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu undang-undang tidak dapat dinilai oleh lembaga lain, jikapun akan dinilai maka yang berhak adalah perlemen sendiri. Jika suatu undang-undang dianggap bertentangan dengan konstitusi maka parlemen sendirilah yang memiliki kewenangan untuk mengubah melalui legislatif review. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan langsung oleh UUD 1945 dan bagian dari kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung.

¹⁵ Abdul Halim Talli, "Integritas dan Aikap Aktif Argumentatif Hakim", Jurnal Al-Daulati, Vol.3. No.1. Juni 2014, hlm.2-3.

¹⁶ Abdullah. ". *Pertimbangan Putusan Pengadilan*". Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri: Surabaya, 2008, hlm. 25

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷

Pembaharuan hukum pidana berkaitan dengan penetapan tindakan sebagai bagian dari sistem pidana. ¹⁸Pengertian tindakan tersebut berupa suatu perlakuan kepada pelaku yang memenuhi beberapa ketentuan pasal-pasal dalam pembaharuan rancangan hukum pidana tersebut, serta tindakan yang dijatuhkan kepada seorang pelaku bersama-sama dengan pidana pokoknya. Undang-undang Hukum Pidana Indonesia menggunakan sistem dua jalur dalam pidana (*double track system*), pelaku tindak pidana tidak hanya dikenakan suatu tindak pidana tetapi juga dapat dijatuhkan beberapa tindakan berdasarkan besar kecilnya suatu tindak pidana.¹⁹ Penjatuhan sanksi yang berupa tindakan ini harus disesuaikan dengan tujuan pidana dan pedoman pidana. Penjatuhan tindakan ini tidak berdasarkan atas ancaman yang ada dalam perbuatan pidananya, melainkan didasarkan terhadap keadaan dan kondisi dari pelaku.²⁰ Terdapat dua kelompok pelaku yang dapat dijatuhkan tindakan, yakni pelaku yang tidak mampu bertanggung jawab atau kurang mampu bertanggung jawab dan pelaku yang mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Hakim dalam mengaktualisasi ide keadilan memerlukan situasi yang kondusif, baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal dari dalam diri seorang Hakim. Jika ditelusuri, faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim dalam mentransformasikan ide keadilan yaitu Jaminan Kebebasan Peradilan (*Independency of Judiciary*), kebebasan peradilan sudah menjadi keharusan bagi tegaknya negara hukum (*rechstaat*). Hakim akan mandiri dan tidak memihak dalam memutus sengketa, dan dalam situasi yang kondusif tersebut, Hakim akan leluasa untuk mentransformasikan ide-ide dalam pertimbangan-pertimbangan putusan. Sedangkan Keyakinan hakim dalam putusan hakim berdasarkan pada keyakinan sampai pada batas tertentu yang didukung argumentasi yuridis yang jelas (*laconviction raisonnee*). Menurut teori ini hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu

¹⁷Abdul Manan, "Aspek-Aspek Pengubah Hukum", (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. .67.

¹⁸Nur Akmal Razaq. 2020. "Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Pespektif Hukum Pidana," Jurnal Inovasi Penelitian Vol 1 No. 3: 1227-1230. hlm. 1228.

¹⁹Muladi. 'Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak' (FCD, BPHN), 2013 (26 Agustus 2013).

²⁰ Fence m. Wantu , *Kendala Hakim dalam Menciptakan Kepastian Huku, Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 25, No.2 Juni 2013, hlm.206.

kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sehingga berdasarkan kemandirian dan keyakinan hakim dalam memutus perkara dapat menegakkan kebenaran dan keadilan melalui berbagai cara seperti: mampu menafsir Undang-undang secara aktual, berani berperan menciptakan hukum baru atau sebagai pembentuk hukum, berani melakukan *contra legem*, mampu berperan mengadili secara kasuistik dan dapat memberikan akses menuju keadilan dalam sistem hukum perdata.

PENUTUP

Pembaruan hukum pidana erat kaitannya dengan keberadaan hukum acara pidana. Indonesia telah memiliki perundangan yang mengatur tentang hukum pidana yang bercirikan dan bercorak nasional. Pembuatan suatu KUHP Nasional hendaknya dilakukan terlebih dahulu sehingga kita dapat menentukan suatu konsep menentukan bagaimana prosedur atau tata cara untuk menegakkan, melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiil tersebut melalui hukum acara pidana. Pengaturan yang terkandung pada KUHP nasional dititik beratkan pada prosedur terpidana mendapatkan efek jera dan mengarahkan kembali ke jalan yang benar serta tetap memberikan suatu keamanan, ketenangan bagi masyarakat luas.

Pembaharuan hukum pidana dititikberatkan pada karakteristik hukum pidana yang terkandung dalam kehidupan masyarakat dan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Aktivitas ini dilakukan oleh alat negara dalam penegakan hukum. Penjatuhan sanksi tindakan merupakan salah satu bentuk penegasan tentang solusi penjatuhan sanksi dengan diberikannya hak kepada Pengadilan untuk menyusun suatu kebijaksanaan tentang pemberian sanksi, yakni sanksi berupa tindakan. Hal tersebut sesuai dengan hukum pidana modern yang mensyaratkan adanya kebebasan bagi hakim dalam memberi dan menjatuhkan sanksi yang akan diberikan untuk orang yang bersangkutan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Asri Umar, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*, Jakarta: Citra Utama, 2007.
- Abdul Halim Talli, “*Integritas dan Aikap Aktif Argumentatif Hakim*”, Jurnal Al-Daulati, Vol.3. No.1. Juni 2014,
- Abdul Ghafur Anshori, “*Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaannya*”, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006
- Asrun, A. Muhammad. *Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di bawah Suharto*, Jakarta: ELSAM, 2004.
- Luhut Pangaribuan, Lay Judges & Hakim Ad Hoc, *Studi Teoritis mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2009.
- Abdullah. “. *Pertimbangan Putusan Pengadilan*”. Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri: Surabaya, 2008.
- Adami Chazaw, “*Pelajaran Hukum Pidana*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Barda Nawawi Arief,. “*Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*”, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2007.
- Badriah, Siti Malikhatun. *Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 2010. Bertens, K. Etika, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Darmoko Yuti Witanto, Arya Putra Negara Kutawaringin.” *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*”, Bandung: Alfabeta.,2013.
- Dewi Rahmaningsih Nugroho and Suteki Suteki. *Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2 No. 3, 2020.
- Eugen Ehrlijk, “*Fundamental Principles of The Sociology of Law*”, NewYork: Russel & Russel Inc., 1962.
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Menyoal Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, PUSAKO Universitas Andalas, Volume II, Nomor 2, November
- Erdianto Efendi, “*Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Fence M. Wantu , *Kendala Hakim dalam Menciptakan Kepastian Huku,Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Pidana*, Jurnal Mimbar Hukum,Volume 25,No.2 Juni 2013.
- “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Pusat StudiWawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan & Alumni, Bandung, 2002.
- Michael Brama, 2016. *Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume III/No. 8.
- Muladi. ‘*Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*’ (FCD, BPHN), 2013 (26 Agustus 2013).
- Mompang L.Panggabean, “*Mencari Sosok Hakim Indonesia yang Ideal*”, Jurnal Hukum Prioris, Vol.3. No.2. Tahun 2013.
- Nina M. Armando (et al), “*Ensiklopedia Islam*”, Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 2005.
- Nur Akmal Razaq. 2020. “*Legalitas Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Pespektif Hukum Pidana,*” Jurnal Inovasi Penelitian Vol 1 No. 3: 2020
- Oemar Seno Adji,.”*Peradilan Bebas Negara Hukum*”, Jakarta: Erlangga, 1980.
- Peter Mahmud Marzuki.”*Penelitian Hukum*”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- RifyalKabah,”*Hukum Islam di Indonesia*”, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Rusli Muhammad, “*Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Satjipto Rahardjo, “*Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*”, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soerjono Soekanto.”*Penelitian Hukum Normatif*”. Jakarta: Rajawali Press. 1998.

- Soetandyo Wignjosoebroto, “*Pembaruan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satjipto Rahadjo, 1989. *Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol Sosial*, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Vol. I/Nomor I
- Sunarto DM., “*Rekonstruksi Hukum Pidana Era Transformasi dan Globalisasi dalam Penegakan Hukum Secara Integratif*”, Orasi Ilmiah, Bandar Lampung: Penerbit Unila, 2009.
- Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia Ford Foundation & HuMa, Jakarta, 2007. Wahbah Zuhaili dan Jamal Athiyah,
- Ahmad Mulyadi, *Kontroversi Pembaruan Fiqih*, Jakarta: Erlangga, 2002